

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memberikan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri kecuali pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri, agama, keuangan, dan bidang tertentu lainnya. Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah telah menimbulkan dampak yaitu korupsi yang begitu marak dan semakin kuat di daerah (Hendra, 2017:2).

Setiap organisasi pasti selalu berusaha meningkatkan kinerjanya agar mencapai tujuan yang baik. Namun seringkali kegiatan peningkatan kinerja tidak mencapai hal yang diharapkan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Daerah dilakukan dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis. Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Keban, 2004:183).

Pada lingkungan instansi pemerintah dikenal adanya budaya kerja aparatur Negara Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 25/KEP/M.PAN/04/2002 tanggal 25 April 2002, budaya kerja aparatur negara diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Organisasi menurut Robbins (2006:586) diartikan sebagai suatu unit (satuan) sosial yang berkoordinasikan dengan sadar, yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah budaya organisasi. Menurut Edy (2010:2) budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai (*values*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), asumsi-asumsi (*assumptions*), atau norma-norma yang telah berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi merupakan keyakinan, sikap, nilai-nilai maupun etika yang akan menjadi pedoman. Sehingga budaya organisasi bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengawasi pegawai mulai dari cara dasar seluruh anggota dan cara bekerja sebagaimana menjalankan pekerjaannya semestinya. Selain itu budaya organisasi itu juga merupakan bagian dari cara berinteraksi antara pegawai satu dan pegawai lainnya. Apabila budaya organisasi ini diterapkan dengan baik pada organisasi maka mengenai kinerja pegawai akan baik pula terhadap organisasi (Robbins 2003:525).

Pemimpin yang efektif yaitu pemimpin yang mengakui kekuatan-kekuatan penting yang terkandung dalam individu atau kelompok. Dalam menjalankan

tugas pemimpin memiliki tiga pola dasar gaya kepemimpinan yaitu yang mementingkan pelaksanaan tugas, yang mementingkan hubungan kerjasama, dan yang mementingkan hasil yang dapat dicapai (Rivai, 2004;8). Menurut Thoah (2013) menyatakan gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang yang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain.

Sistem informasi akuntansi dan standar akuntansi pemerintah adalah salah satu bentuk pengendalian yang digunakan oleh organisasi sektor publik untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap kinerja organisasi dalam pemerintahan daerah tersebut. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas (Cokroaminoto, 2007). Hall (2001:10), sistem informasi akuntansi adalah sistem yang terdiri dari tiga sub sistem, yaitu *transaction processing systems*, *generalledger/financia lreporting system*, *managment reporting systems*. Husien (2004:2) sistem informasi akuntansi menggunakan aktifitas sistematis untuk menghasilkan informasi yang relevan.

Standar akuntansi pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Standar akuntansi pemerintah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.

Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Sistem informasi akuntansi yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi harus sejalan dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan (Husein, 2004;3). Kinerja pada organisasi pemerintah daerah perlu dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pemahaman para pelaksana dan mengukur pencapaian prestasi, mengukur tercapainya skema prestasi yang sudah disepakati, memonitor dan mengevaluasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Irwan (2016) yang berjudul “pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, sistem informasi akuntansi dan standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa” menjelaskan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, sistem informasi akuntansi dan standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja organisasi. Semakin tinggi budaya organisasi, gaya kepemimpinan, sistem informasi akuntansi dan standar akuntansi pemerintah semakin meningkat pula kinerja organisasi di Kabupaten Sumbawa. Sasaran strategis Kabupaten Sumbawa merupakan sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) kabupaten Sumbawa 2011-2015. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data primer diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada responden penelitian.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2022) yang berjudul “pengaruh gaya kepemimpinan, sistem informasi, standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja organisasi pada Pemerintah Kota Bima” menjelaskan tujuan penelitian ini untuk menguji gaya kepemimpinan, sistem informasi, standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja organisasi pada Pemerintah Kota Bima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan teori penetapan tujuan (GoalSetting) menjelaskan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit, dengan umpan balik menghasilkan kinerja yang tinggi dan teori kontijensi digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan dalam berbagai macam tujuan dan untuk menghadapi persaingan (Otley, 1980).

Kabupaten Kupang cenderung berubah mengikuti perkembangan covid-19. Fenomena yang terjadi adalah pada masa pandemi covid-19 budaya organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mengalami perubahan karena harus mengikuti sistem yang dibuat. Yang kemudian berpengaruh pada gaya kepemimpinan untuk karyawan, informasi akuntansi serta standar akuntansi kemudian pada kinerja organisasi Kabupaten Kupang. Peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Sistem Informasi Akuntansi Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Pada Pemeritah Daerah Kabupaten Kupang”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian adalah apakah Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Sistem Informasi

Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi pada Pemerintah Daerah bagian Organisasi Setda Kabupaten Kupang ?

1.3 Persoalan penelitian

Dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah kabupaten kupang?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah kabupaten kupang?
3. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah?
4. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah kabupaten kupang?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dari persoalan penelitian diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi pada pemerintah daerah bagian organisasi setda kabupaten kupang.
2. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi pada pemerintah daerah bagian organisasi setda kabupaten kupang.
3. Untuk menguji pengaruh sistem pemerintah daerah terhadap kinerja organisasi pada pemerintah daerah bagian organisasi setda kabupaten kupang.
4. Untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah daerah terhadap

kinerja organisasi pada pemerintah daerah bagian organisasi setda kabupaten kupang.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan peneliti tentang pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, sistem informasi akuntansi dan standar akuntansi pemerintah daerah terhadap kinerja organisasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, sumber informasi untuk memperdalam penulis terkait pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, sistem informasi akuntansi dan standar akuntansi pemerintah daerah terhadap kinerja organisasi.